

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

##### 1.1.1. Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai visi yaitu ***"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"***.

##### 1.1.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Adapun misi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Misi I : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah
2. Misi III : Meningkatkan sumber daya Manusia yang unggul dan handal dan Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan pembangunan yang Demokrasi
3. Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi
4. Misi VI : Meningkatkan Pengendalian Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup

## 1.2. Tujuan dan Sasaran

### 1.2.1. Tujuan

1. Terwujudnya penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintah umum, pembangunan dan pelayanan publik yang tepat
2. Terwujudnya pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah yang efisien dan tepat
3. Terwujudnya ASN pemerintah provinsi yang profesional dalam memberikan pelayanan
4. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi

5. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
6. Terwujudnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum
7. Meningkatnya rekomendasi kebijakan bidang perekonomian
8. Meningkatnya akuntabilitas penyusunan kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan
9. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah atau negara
10. Birokrasi yang bersih dan akurat
11. Meningkatnya pelayanan umum dan kesekretariatan Setda
12. Tercapainya informasi kehumasan dan layanan keprotokolan yang efektif, efisien dan berkualitas

#### 1.2.2. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas dan jumlah kebijakan dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama.
2. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kwilayahan dan kerjasama.
3. Meningkatnya pelayanan publik dibidang keagamaan.

4. Meningkatnya pelayanan publik kepada penerima hibah dan bansos.
5. Meningkatnya pelayanan di bidang pendidikan KB, pemuda dan Pariwisata.
6. Meningkatnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, peyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum.
7. Meningkatnya rekomendasi kebijakan di bidang sumber daya alam.
8. Meningkatnya rekomendasi kebijakan di Bidang BUMD, Penanaman Modal , Pariwisata dan Budaya.
9. Meningkatnya rekomendasi kebijakan di Bidang Administrasi Perekonomian.
10. Meningkatnya Akuntabilitas Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pembangunan.
11. Terciptanya pengadaan barang atau jasa yang transparan, akuntabel, terbuka dan kompetitif.
12. Meningkatnya nilai manajemen perubahan.
13. Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi.
14. Meningkatnya penataan ketatalaksanaan Pemda.
15. Meningkatnya nilai akuntabilitas.
16. Meningkatnya kualitas pembinaan pelayanan publik.

17. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan
18. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan.
19. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang keuangan.
20. Meningkatnya informasi kehumasan yang diterima oleh public.
21. Meningkatnya agenda pimpinan daerah yang terlayani

### 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah mempunyai Tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan secara administratif.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah Provinsi.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

3. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah Provinsi.
4. Pelayanan Administratif dan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah.
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Guna mendukung tugas dan fungsi tersebut, secara struktural, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari : 1 (Satu) Sekretaris Daerah, 3 (Tiga) Asisten, 9 (sembilan) Kepala Biro dan 27 (duapuluhtujuhkepalabagian) serta 81 (delapanpuluhsatukepala sub bagian).

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur dengan susunan Organisasi sebagai berikut:

- I. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
  1. Biro Pemerintahan, membawahkan:
    - i. Bagian Administrasi Kewilayahan, terdiri dari :
      - a. Sub Bagian Pengembangan Wilayah dan Batas Daerah.
      - b. Sub Bagian Tata Usaha
      - c. Sub Bagian Administrasi Pertanahan.
    - ii. Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari :
      - a. Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
      - b. Sub Bagian Fasilitas Kepala Daerah dan Legislatif.
      - c. Sub Bagian Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan.

- iii. Bagian Kerja Sama , terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Fasilitas Instansi Vertikal.
  - b. Sub Bagian Kerja sama Swasta dan Luar Negeri.
  - c. Sub Bagian Kerja sama Antar Daerah.
- 2. Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
  - i. Bagian Fasilitas Keagamaan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Tata Usaha.
    - b. Sub Bagian Urusan Perhajian, Wakaf dan Zakat.
    - c. Sub Bagian Kelembagaan dan Bina Kerukunan Beragama.
  - ii. Bagian Pendidikan, Keluarga Berencana, Pemuda dan Pariwisata, terdiri dari:
    - a. Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan.
    - b. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
    - c. Sub Bagian Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
  - iii. Bagian Sosial, Kesehatan dan Transmigrasi, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Kesehatan.
    - b. Sub Bagian Sosial
    - c. Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 3. Biro Hukum, membawahkan :
  - i. Bagian Hukum Perundang-Undangan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Peraturan Daerah
    - b. Sub Bagian Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur
    - c. Sub Bagian Naskah Hukum Lainnya

- ii. Bagian Pelayanan Hukum, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Sengketa Hukum
  - b. Sub Bagian Bagian Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum
  - c. Sub Bagian Penyelesaian Hukum dan HAM
- iii. Bagian Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan Hukum
  - b. Sub Bagian Publikasi Informasi Hukum
  - c. Sub Bagian Tata Usaha

II. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

- 1. Biro Perekonomian, membawahkan :
  - i. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Analisis Makro Ekonomi Sarana dan Perekonomian
    - b. Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
    - c. Sub Bagian Tata Usaha
  - ii. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan.
    - b. Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral
    - c. Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - iii. Bagian BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya
    - a. Sub Bagian Pariwisata dan Budaya
    - b. Sub Bagian BUMD
    - c. Sub Bagian Penanaman Modal



2. Biro Pembangunan, membawahkan :
  - i. Bagian Perencanaan dan Pengendalian, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Perencanaan Penyusunan Program Sekretariat Daerah
    - b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan
    - c. Sub Bagian Tata Usaha
  - ii. Bagian Monitoring dan Evaluasi APBD, terdiri dari:
    - a. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi APBD Wilayah I
    - b. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi APBD Wilayah II
    - c. Sub Bagian Evaluasi Kebijakan Pembangunan APBD
  - iii. Bagian Monitoring dan Evaluasi APBN
    - a. Sub Bagian Monev APBN Wilayah I
    - b. Sub Bagian Evaluasi Kebijakan Pembangunan APBN
    - c. Sub Bagian Monev APBN Wilayah II
3. Biro Layanan Pengadaan, membawahkan :
  - i. Bagian Data Informasi
    - a. Sub Bagian Pengelolaan Data dan Informasi
    - b. Sub Bagian Layanan Publik
    - c. Sub Bagian Tata Usaha
  - ii. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
    - a. Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa
    - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
    - c. Sub Bagian Pencegahan dan Penanganan Pengaduan
  - iii. Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    - a. Sub Bagian Sistem Pengadaan Secara Elektronik
    - b. Sub Bagian Registrasi dan Verifikasi
    - c. Sub Bagian Layanan dan Dukungan

III. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

1. Biro Organisasi, membawahkan :
  - i. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Analisis Organisasi
    - b. Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
    - c. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan
  - ii. Bagian Pengembangan Kinerja, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja
    - b. Sub Bagian Data Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
    - c. Sub Bagian Peningkatan Kinerja
  - iii. Bagian Tata Laksana, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan
    - b. Sub Bagian Tata Laksana Pelayanan Publik
    - c. Sub Bagian Tata Usaha
2. Biro Umum, membawahkan :
  - i. Bagian Rumah Tangga, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Rumah Tangga
    - b. Sub Bagian Tata Usaha
    - c. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
  - ii. Bagian Perlengkapan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - b. Sub Bagian Pengandaan dan Pemeliharaan
    - c. Sub Bagian Inventarisasi dan Penyimpanan
  - iii. Bagian Keuangan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Urusan Gaji
    - b. Sub Bagian Perjalanan Dinas
    - c. Sub Bagian Perbendaharaan

3. Biro Humas dan Protokol membawahkan :

- i. Bagian Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Sub Bagian Informasi Pemerintahan dan Umum
  - c. Sub Bagian Informasi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesra
- ii. Bagian Humas, Dokumentasi, Publikasi Media, dan IT
  - a. Sub Bagian Dokumentasi dan Audio Visual
  - b. Sub Bagian Publikasi Media Cetak
  - c. Sub Bagian Publikasi Media Elektronik dan IT
- iii. Bagian Protokol
  - a. Sub Bagian Undangan
  - b. Sub Bagian Acara
  - c. Sub Bagian Pelayanan Tamu

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

V. Staf Ahli

Komposisi Pegawai Secara keseluruhan jumlah personil termasuk honorer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 500 orang, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel I.1  
Klasifikasi ASN Berdasarkan Eselon pada Sekretariat Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	ESELON I	1
2	ESELON II	7
3	ESELON III	27
4	ESELON IV	80
5	JFU/JFT/CPNS	183
6	HONORER	202
<b>Total</b>		<b>500</b>

*Sumber : BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019*

Tabel I.2  
Klasifikasi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Sekretariat Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

<b>NO</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	S3	3
2	S2	40
3	S1	212
4	D4	9
5	D3	30
6	D1	3
7	SMA/SMK	180
8	SMP	16
9	SD	7
<b>Total</b>		<b>500</b>

*Sumber : BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019*

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Untuk Penetapan Kinerja 2019, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan review terhadap sasaran, indikator dan target kinerja tahun 2019, dikarenakan sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan sebelumnya belum memenuhi kriteria spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), relevan (*relevance*), dan memiliki batasan waktu (*time-bound*).

Adapun review terhadap Perjanjian kinerja 2019 tersebut tentunya diselaraskan atau disesuaikan dengan rencana strategis 2017-2022 yang juga telah dilakukan review atau perubahan. Dalam rencana strategis

ataupun dalam Perjanjian Kinerja 2019 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas dan jumlah kebijakan di bidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama.
2. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien di bidang otonomi daerah, administrasi kwilayahan dan kerjasama.
3. Meningkatnya pelayanan publik di bidang keagamaan.
4. Meningkatnya pelayanan publik kepada penerima hibah dan bansos.
5. Meningkatnya pelayanan di bidang pendidikan KB, pemuda dan Pariwisata.
6. Meningkatnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum.
7. Meningkatnya rekomendasi kebijakan di bidang sumber daya alam.
8. Meningkatnya rekomendasi kebijakan di Bidang BUMD, Penanaman Modal , Pariwisata dan Budaya.
9. Meningkatnya rekomendasi kebijakan di Bidang Administrasi Perekonomian.

10. Meningkatnya Akuntabilitas Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pembangunan.
11. Terciptanya pengadaan barang atau jasa yang transparan, akuntabel, terbuka dan kompetitif.
12. Meningkatnya nilai manajemen perubahan.
13. Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi.
14. Meningkatnya penataan ketatalaksanaan Pemda.
15. Meningkatnya nilai akuntabilitas.
16. Meningkatnya kualitas pembinaan pelayanan publik.
17. Meningkatnyakepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan
18. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan.
19. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang keuangan.
20. Meningkatnya informasi kehumasan yang diterima oleh public.
21. Meningkatnya agenda pimpinan daerah yang terlayani.

## 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RENJA )

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Pembangunan telah menyusun rencana kinerja (renja) tahun 2019telah disampaikan kepada Bappelitbangda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pada bulan Desember tahun 2019 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan revisi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Prov. Kep. Babel tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel II.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TH. 2019
1	2	3	4	5
<b>BIRO PEMERINTAHAN</b>				
1	Terwujudnya penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintah umum, pembangunan dan pelayanan publik yang tepat	Meningkatnya kualitas dan jumlah kebijakan dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama	Persentase uraian dalam LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi	85%
2	Terwujudnya pengkoordinasian	Meningkatnya pelaksanaan	Presentase koordinasi	85%



	administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah yang efisien dan tepat	koordinasi administrasi wilayah	administrasi kewilayahan yang dilaksanakan	
3	Terwujudnya ASN pemerintah provinsi yang profesional dalam memberikan pelayanan	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama	Presentase pelayanan administrasi dan penyediaan dokumen bagi pemerintah daerah	85%
4	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi	Meningkatnya partisipasi publik dalam berdemokrasi dan berpolitik serta kebebasan menyampikan pendapat/aspirasi	Presentase partisipasi publik dalam berdemokrasi dan berpolitik serta kebebasan menyampikan pendapat/aspirasi	85%

BIRO KESRA				
1	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan publik dibidang keagamaan	Persentase fasilitasi bidang keagamaan	85%
		Meningkatnya pelayanan publik kepada penerima hibah dan bansos	Persentase masyarakat penerima hibah dan bansos yang terbaru	85%
		Meningkatnya pelayanan di bidang pendidikan KB, pemuda dan Pariwisata	Persentase perumusan kebijakan dan koordinasi bidang pendidikan KB, pemuda dan pariwisata	70%
BIRO HUKUM				
1	Terwujudnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum serta dokumentasi dan	Meningkatnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, peyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum serta dokumentasi dan	Persentase kualitas dan kuantitas produk hukum	85%
			Persentase pelayanan hukum pemerintah daerah	85%
			Persentase publikasi produk hukum	85%

	informasi hukum	informasi hukum		
BIRO EKONOMI				
1	Meningkatnya rekomendasi kebijakan bidang perekonomian	Meningkatnya rekomendasi kebijakan di bidang sumber daya alam	Persentase rekomendasi kebijakan terkait sumber daya alam	85%
		Meningkatnya rekomendasi kebijakan di Bidang BUMD, Penanaman Modal , Pariwisata dan Budaya	Persentase rekomendasi kebijakan terkait BUMD, Penanaman Modal , Pariwisata dan Budaya yang di implementasikan	85%
		Meningkatnya rekomendasi kebijakan di Bidang Administrasi Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan terkait Administrasi Perekonomian yang di implementasikan	85%
BIRO PEMBANGUNAN				
1	Meningkatnya akuntabilitas penyusunan kebijakan	Meningkatnya fasilitasi pengendalian kebijakan dan	Persentase fasilitasi kebijakan dan koordinasi bidang	85%

	dan koordinasi bidang pembangunan	koordinasi bidang pembangunan	pembangunan yang termanfaatkan	
<b>BIRO LAYANAN PENGADAAN</b>				
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah atau negara	Tercipatnya pengadaan barang atau jasa yang transparan, akuntabel, terbuka dan kompetitif	Persentase belanja pengadaan melalui e-procurement	92%
<b>BIRO ORGANISASI</b>				
1	Birokrasi yang bersih dan akurat	Meningkatnya nilai manajemen perubahan	Persentase Peningkatan komitmen pimpinan PD dan pegawai dalam melakukan RB	53%
			Persentase pola pikir dan budaya kerja	44%
			Persentase menurunnya resiko kegagalan	53%
		Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi	Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien)	54%

		Meningkatnya penataan ketatalaksanaan Pemda	Persentase peningkatan ketatalaksanaan Pemda	60%
		Meningkatnya nilai akuntabilitas	Persentase peningkatan nilai laporan kinerja	60%
		Meningkatnya kualitas pembinaan pelayanan publik	Index pelayanan publik	54%
<b>BIRO UMUM</b>				
1	Meningkatnya pelayanan umum dan kesekretariatan Setda	Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan	64,46
		Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan	64,46
		Meningkatnya kepuasan atas	Tingkat kepuasan atas pelayanan	64,46

		pelayanan keuangan	bidang keuangan	
<b>BIRO HUMAS DAN PROTOKOL</b>				
1	Tercapainya informasi kehumasan dan layanan keprotokolan yang efektif, efisien dan berkualitas	Meningkatnya informasi kehumasan yang diterima oleh publik	Persentase informasi kehumasan yang diterima oleh publik	100%
		Meningkatnya agenda pimpinan daerah yang terlayani	Persentase agenda pimpinan daerah yang terlayani	100%

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel III.1.  
Capaian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas dan jumlah kebijakan dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama	Persentase kebijakan yang diterbitkan dalam rangka harmonisasi dan efektifnya pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan	70%	103%	147%
2	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kwilayahan dan kerjasama	Persentase Koordinasi pelaksanaan Otonomi Daerah yang dilaksanakan	70%	103%	147%
3	Meningkatnya pelayanan publik dibidang keagamaan	Persentase fasilitasi bidang keagamaan	80%	85,55%	107%
4	Meningkatnya pelayanan publik kepada penerima hibah dan bansos	Persentase masyarakat penerima hibah dan bansos	80%	82,34%	103%

5	Meningkatnya pelayanan di bidang pendidikan KB, pemuda dan Pariwisata	Persentase kebijakan dan koordinasi bidang pendidikan KB, pemuda dan pariwisata	75%	83,47%	111%
6	Meningkatnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, peyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum	Persentase kualitas dan kuantitas produk hukum	85%	114%	134%
		Persentase pelayanan hukum pemerintah daerah	90%	66,00%	73,33%
		Persentase publikasi produk hukum	85%	115%	136%
7	Meningkatnya rekomendasi kebijakan di bidang sumber daya alam	Persentase rekomendasi kebijakan terkait sumber daya alam	80%	95,54%	119%
8	Meningkatnya rekomendasi kebijakan di Bidang BUMD, Penanaman Modal , Pariwisata dan Budaya	Persentase rekomendasi kebijakan terkait BUMD, Penanaman Modal , Pariwisata dan Budaya yang di implementasikan	80%	57,25%	71,56%
9	Meningkatnya rekomendasi kebijakan di Bidang Administrasi Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan terkait Administrasi Perekonomian	80%	95,95%	120%
10	Meningkatnya Akuntabilitas Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pembangunan	Presentase Nilai Akuntabilitas Pengendalian Pembangunan	90%	90,00%	100%
11	Terciptanya pengadaan barang atau jasa yang transparan, akuntabel, terbuka dan kompetitif	Persentase belanja pengadaan melalui e-procurement	90%	108%	120%



12	Meningkatnya nilai manajemen perubahan	Persentase Peningkatan komitmen pimpinan PD dan pegawai dalam melakukan RB	50%	172%	344%
		Persentase pola pikir dan budaya kerja	40%	112%	281%
		Persentase menurunnya resiko kegagalan	50%	112%	225%
13	Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi	Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien)	50%	121%	241%
14	Meningkatnya penataan ketatalaksanaan Pemda	Persentase peningkatan ketatalaksanaan Pemda	55%	172%	313%
		Persentase Disiplin Pegawai	50%	172%	344%
15	Meningkatnya nilai akuntabilitas	Persentase peningkatan nilai laporan kinerja	56%	112%	201%
16	Meningkatnya kualitas pembinaan pelayanan publik	Index pelayanan publik	50%	172%	344%
17	Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan	63%	89,69%	143%
18	Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan	63%	89,69%	143%
19	Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang keuangan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang keuangan	63%	89,69%	143%
20	Meningkatnya informasi kehumasan yang diterima oleh public	Persentase informasi kehumasan yang diterima oleh publik	80%	116%	145%
21	Meningkatnya agenda pimpinan daerah yang terlayani	Persentase agenda pimpinan daerah yang terlayani	80%	104%	130%

Hambatan dan Upaya dalam mencapai sasaran strategis adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan jumlah kebijakan dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama.

*Hambatan* : Kondisi keuangan daerah tidak mencukupi sehingga menjadi faktor penghambat pembangunan. Sementara pemerintah daerah lemah dalam kebijakan. Di sisi yang lain juga banyak terjadi persoalan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD. Keinginan masyarakat akan selalu bertabrakan dengan kepentingan elit sehingga dalam penetapan anggaran belanja daerah, lebih cenderung mencerminkan kepentingan elit daripada kepentingan masyarakat.

*Upaya* : Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mengatur keuangan daerah sehingga dapat mencukupi kebutuhan pembangunan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penyusunan APBD sehingga Keinginan masyarakat dapat terpenuhi.

2. Meningkatnya pelayanan publik dibidang keagamaan

*Hambatan* : Keterbatasan aparatur pemerintahan, sehingga tidak mampu secara optimal dalam memberikan pelayanan.

*Upaya* : melakukan pendidikan dan pelatihan secara berkala bagi aparatur pemerintahan, sehingga memiliki kapabilitas dan profesionalitas tinggi dalam melayani masyarakat.

3. Meningkatnya pelayanan publik kepada penerima hibah dan bansos

*Hambatan:* Dalam proses pelayanan sering kali masyarakat tidak melakukan apa yang sudah diatur dalam aturan.

*Upaya* : memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah harus segera bisa mengubah paradigma para aparatur dari mau dilayani menjadi pelayan yang baik serta tertib dan tegas dalam menerapkan aturan yang berlaku.

4. Meningkatnya pelayanan di bidang pendidikan KB, pemuda dan Pariwisata

*Hambatan:* Keterbatasan aparatur pemerintahan, sehingga tidak mampu secara optimal dalam memberikan pelayanan.

*Upaya* : Mengadakan Sistem rekrutmen aparatur pemerintahan, dengan Seleksi aparatur, sehingga mampu menghasilkan pegawai yang professional.

5. Meningkatnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum.

*Hambatan:* kurangnya kesesuaian produk hukum daerah dengan kebutuhan masyarakat.

*Upaya* : dengan memeriksa kembali rancangan produk hukum daerah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

6. Meningkatnya rekomendasi kebijakan di bidang sumber daya alam.

*Hambatan* : Kurangnya pengawasan yang baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sehingga jangan sampai terjadi berbagai kebijakan yang merusak lingkungan yang terjadi di setiap kabupaten atau kota yang ada di Provinsi.

*Upaya* : Pemerintah Pusat harus aktif dalam melakukan pengawasan sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Daerah.

7. Meningkatnya Akuntabilitas Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Bidang Pembangunan

*Hambatan* : Monev belum bisa menjadi media atau alat ukur untuk pengendalian pembangunan secara optimal

*Upaya* : Meningkatkan Kualitas sistem pengendalian pembangunan di Provinsi.

8. Terciptanya pengadaan barang atau jasa yang transparan, akuntabel, terbuka dan kompetitif

*Hambatan* : Masih adanya intervensi dari berbagai kelompok yang berkepentingan, baik eksternal maupun internal sehingga kurangnya minat pegawai untuk menjadi panitia pengadaan barang/jasa dan pegawai aparatur yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui ULP.

*Upaya* : Melakukan upaya baik melalui kapasitas referensi, konsultasi maupun pembinaan teknis kepada OPD akan pentingnya melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui ULP.

9. Meningkatnya nilai manajemen perubahan.

*Hambatan* : Dalam mencapai indikator yang telah ditetapkan terkadang kurang didukungnya dana, mengingat kondisi keuangan daerah yang lebih memprioritaskan program-program yang lebih penting.

*Upaya* : Akan diusulkan lagi program dan kegiatan yang dapat mencapai indikator kegiatan yang telah direncanakan.

10. Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi

*Hambatan* : Masih kurangnya pemahaman OPD untuk mengimplementasikan serta melaksanakan kinerja organisasinya.

*Upaya* : Melakukan monitoring dan evaluasi.

11. Meningkatnya penataan ketatalaksanaan Pemda.

*Hambatan:* Kurangnya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

*Upaya* : Mengadakan pembinaan bimtek terhadap pelaksanaan SOP secara terus menerus

12. Meningkatnya nilai akuntabilitas.

*Hambatan* : Masih kurangnya pemahaman SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam membenahi dokumen SAKIP, dan pentingnya pemanfaatan dokumen tersebut bagi peningkatan kinerja SKPD.

*Upaya* : Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu melakukan pembinaan dalam meningkatkan pemahaman terhadap implementasi SAKIP baik di lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka maupun di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bentuk Bimtek SAKIP.

13. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan

*Hambatan* : belum optimalnya Layanan Umum dan Rumah Tangga sesuai SOP

*Upaya* : Meningkatkan kikerja ASN

14. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan

*Hambatan* : data barang milik daerah pada Sekretariat daerah sering berpindah/berubah ubah tanpa adanya pemberitahuan maupun pencatatan yang jelas serta belum sepenuhnya mendapat dukungan dana, mengingat kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas

*Upaya* : memperbaharui pencatatan dan pengawasan terhadap asset dan mutasi barang yang dilakukan secara berkala.

15. Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang keuangan

*Hambatan* : Kurangnya Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Setda

*Upaya* : Meningkatkan kikerja ASN

16. Meningkatnya informasi kehumasan yang diterima oleh publik

*Hambatan* : Keterbatasan Informasi dan Dokumentasi yang bisa diakses Publik (PD Pembantu)

*Upaya* : Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana

17. Meningkatnya agenda pimpinan daerah yang terlayani

*Hambatan* : Kurangnya anggaran kegiatan dalam melayani tamu pemerintah dan negara

*Upaya* : Menambahkan anggaran agar kegiatan berjalan dengan baik.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja dapat diuraikan realisasi Anggaran sebagai berikut:

Tabel III.2.  
Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	Rp 1.881.795.725	Rp 1.677.192.804	89,13%
2	Program Pengembangan Otonomi Daerah	Rp 789.217.500	Rp 741.778.578	93,99%
3	Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	Rp 687.660.850	Rp 666.498.578	96,92%
4	Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan	Rp 10.189.781.244	Rp 8.717.697.220	85,55%
5	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Rp 95.290.000	Rp 78.461.400	82,34%
6	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, Kb, Dan Pemuda	Rp 948.782.250	Rp 791.989.000	83,47%
7	Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 212.950.000	Rp 206.849.700	97,14%



8	Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah	Rp 337.950.000	Rp 189.585.700	56,10%
9	Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum	Rp 1.343.004.400	Rp 1.316.947.960	98,06%
10	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp 6.737.500	Rp 6.437.300	95,54%
11	Program Peningkatan Koordinasi Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya	Rp 473.475.000	Rp 271.052.600	57,25%
12	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Rp 1.490.792.000	Rp 1.430.487.012	95,95%
13	Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN	Rp 63.600.000	Rp 41.326.524	64,98%
14	Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	Rp 170.010.000	Rp 121.879.500	71,69%
15	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Rp 794.134.800	Rp 744.141.427	93,70%
16	Program Perencanaan Setda	Rp 68.499.500	Rp 49.724.600	72,59%
17	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 1.121.384.000	Rp 1.030.944.311	91,93%
18	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp 1.957.187.500	Rp 1.653.776.602	84,50%

19	Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan	Rp 1.074.069.500	Rp 889.597.497	82,82%
20	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan	Rp 270.253.400	Rp 244.708.431	90,55%
21	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 226.873.500	Rp 191.195.562	84,27%
22	Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Rp 1.281.608.450	Rp 1.214.630.908	94,77%
23	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Rp 53.804.247.160	Rp 48.257.029.278	89,69%
24	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT	Rp 1.386.882.050	Rp 1.366.525.000	98,53%
25	Program Peningkatan Pelayanan Protokoler	Rp 204.067.750	Rp 180.074.100	88,24%
26	Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan Dan Penyaringan Informasi	Rp 1.367.840.750	Rp 1.339.360.061	97,92%

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dokumen ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas dan fungsi PD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan PD tahun 2020.

Dari sasaran strategis yang hendak dicapai, rata-rata semuanya mencapai kinerja “berhasil” Sedangkan untuk sasaran strategis yang belum mencapai target tetap akan ditingkatkan dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.